

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)

Oleh:

**WAHYUNI SAMALAM
E.11.18.112**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)

Oleh :

Wahyuni Samalam

E.11.18.112

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 04 juni 2022

Pembimbing I



Reyther Biki, SE, M.Si

NIDN: 09 270770 01

Pembimbing II



Afriana Lomagio, SE, M.Ak

NIDN: 09 290492 03

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (studi pada pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara)

OLEH :

WAHYUNI SAMALAM
E1118112

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. DR. ARIFIN, SE., M.Si
(Ketua Penguji)
2. FITRIANTI, SE, M.Ak
(Anggota Penguji)
3. NURBAITI MOKOGINTA, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)
4. REYTHERR BIKI, SE., M.Si
(Pembimbing Utama)
5. AFRIANA LOMAGIO, SE, M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
D.R. M. Usafir, SE., M.Si
NIDN : 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi


Melinda Ibrahim, SE., M.SA., CTA, ACPA
NIDN : 0920058601

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali serta tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 04 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



WAHYUNI SAMALAM
NIM: E1118112

ABSTRACT

WAHYUNI SAMALAM. E1118112. THE EFFECT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS (A STUDY AT THE REGIONAL GOVERNMENT OF NORTH GORONTALO REGENCY)

This study aims to find to what extent the effect of Government Accounting Standards on the Quality of Financial Statements (a study at the Regional Government of North Gorontalo Regency). The method used in this study is a quantitative method with a survey approach. The data analysis technique uses a simple linear regression. This study takes place at the Regional Government of North Gorontalo Regency. The data collection technique is through a questionnaire distribution addressed to 30 respondents. The results of the study indicate that Government Accounting Standards have a positive and significant effect on the Quality of Financial Statement at the Regional Government of North Gorontalo Regency. The better the Government Accounting Standards in an area, the better the quality of the financial statements produced.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Statement Quality



ABSTRAK

WAHYUNI SAMALAM, E1118112, PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif dengan pendekatan survei, Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kusioner kepada 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Semakin baik SAP pada suatu daerah maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kata kunci: SAP, Kualitas Laporan Keuangan



KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja, dan syukur kehadiran Allah SWT seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian Pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari pembimbing dan anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggungjawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang paling dalam dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan yang baik, moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Kepada bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Pembina Yayasan sekaligus Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Muh. Ichsan Gaffar SE., M.Si, selaku ketua Yayasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.H.Musafir, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi,

Ibu Melinda Ibrahim,SE.,M.SA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Reyther Biki SE,M.Si selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis selama mengerjakan skripsi ini, Ibu Afriana Lomagio, SE.M.Ak, selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Teristimewa Kedua Orang Tuaku tercinta bapak Tarif Samalam dan Ibu Selvi kuengo yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan yang baik, moral dan material. dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa. Tak lupa ucapan terima kasih kepada tataku Jumiatty Samalam S.Km yang sudah membantu dan memberikan motivasi kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada teman saya Sabria Tue yang sudah membantu saya dalam pengambilan data di lapangan, teman – teman mahasiswa Akuntansi 2018 (Jita, Wiwid Adelya, Ka Novi, Ka Anti, Ranti, Ka Dilva, Lika, Listia, Nuzri, Iyan, Dela, Mila, Vera, Agus, Alwi, Rizal, Safril, Ramin, Ka Safrin, Ridal) yang selalu memberikan do'a dan motivasi. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan selama penulisan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu di harapkan saran dan kritik

yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan usulan penelitian ini dimasa yang akan datang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah di berikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 2022

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu lelah selesai(dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya(urusan)yang lain dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap” (Q.S. Al-insyirah:6-8)
“aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari tuhan dan aku percaya ia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah ia tetapkan”. (Lutcy siera)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan karya ini untuk :

KEDUA ORANG TUAKU

Bapak Tarif Samalam dan Ibu Selvi Kuengo

Sebagai tanda buktiku dan cintaku kepada kalian serta terima kasih untuk setiap doa kasih sayang, motivasi,dan pengorbanan yang selalu kalian berikan padaku tanpa doa dan restu aku tidak akan sampai dititik ini.

KAKAK DAN ADIKKU TERCINTA

Yang selalu mendoakan, memotivasi dan dukungan dalam berbagai hal.

MEREKA YANG SELALU ADA

Teman – teman akuntansi Angkatan 2018

Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya

“dosen pembimbing dan dosen penguji yang sangat berjasa”

dan

KELUARGA BESAR & ALMAMATER

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
Bookmark not defined.	
2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	7
2.1.1.1 Akuntansi Pemerintahan.....	9
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi pemerintahan.....	10

2.1.1.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	12
2.1.1.4 Syarat Akuntansi Pemerintahan.....	13
2.1.1.5 Laporan keuangan pemerintah.....	14
2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	15
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	19
2.1.4 Pengertian Akuntabilitas.....	20
2.1.4.1 Tujuan Akuntabilitas.....	24
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	26
2.3 Hipotesis.....	28
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian.....	29
3.2 Metode Penelitian.....	29
3.2.1 Desain Penelitian.....	29
3.2.2 Operasional Variabel.....	30
3.2.3 Populasi dan Sampel.....	32
3.2.3.1 Populasi.....	32
3.2.3.2 Sampel.....	33
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.2.4.1 Jenis Data.....	35
3.2.4.2 Sumber Data.....	35

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.6 Prosedur Penelitian.....	36
3.2.6.1 Uji Validitas.....	36
3.2.6.2 Uji Reabilitas.....	38
3.2.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.2.7 Metode Analisis Data.....	39
3.2.8 Pengujian Hipotesis.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara.....	42
4.1.2 Visi dan Misi.....	51
4.1.3 Kondisi Geografis.....	51
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Analisis Deskriptif.....	54
4.2.1.1 Karakteristik Responden.....	54
4.2.2 Karakteristik Variabel Penelitian.....	55
4.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	65
4.2.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintah (X).....	65
4.2.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y). 66	
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	67
4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas Data.....	67
4.2.5 Analisis Data Statistik.....	68
4.2.6 Hipotesis Penelitian.....	70

4.2.7 Hubungan Korelasi Antar Variabel.....	71
4.3 Pembahasan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
.....	78
defined.	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Operasional Variabel X.....	33
Tabel 3.2 Operasional Variabel Y.....	34
Tabel 3.3 Bobot Nilai Variabel.....	34
Tabel 3.4 Populasi Penelitian.....	35
Tabel 3.5 Sampel Penelitian.....	36
Tabel 3.6 Koefisien Guilford.....	40
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Angket.....	52
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	53
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Umur.....	53
Tabel 4.4 Tabel skalapenelitian jawaban responden.....	55
Tabel 4.5 Jawaban Respondent tentang Standar Akuntansi Pemerintah (X).....	55
Tabel 4.6 Tanggapan Respondent tentang Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji validitas dan Reliabilitas Variabel X	58
Tabel 4.8 Hasil Uji validitas dan Reliabilitas Variabel Y.....	59
Tabel 4.9 Model persamaan regresi.....	60
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis X terhadap Y.....	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Keberartian Koefisien Regresi.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaPemikiran.....	31
Gambar 3.2 Model AnalisisRegresiSederhana.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara memerlukan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara yang sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan. (Nopianti, 2017). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintah yang diatur undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, supaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Undang – undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus menetapkan pemberian dana otonomi khusus bagi daerah hanya sampai 20 tahun (2008-2017). Namun tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai fenomena dengan perkembangan pemerintah di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas keuangan terhadap pemerintah. Oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak – hak public.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia merespon tuntutan akuntabilitas dengan di tetapkannya undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akntabilitas kepada rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara khususnya atas hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya beradadi tangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena hal kedua tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada sector public di Indonesia saat, ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin dituntut untuk melaksanakan tata Kelola pemerintah yang baik adalah cara pengelolaan negara yang baik (*good government governance*). Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah cara pengelolaan negara yang memenuhi karakteristik *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness*, dan *accountabillity* (UNDP,1997).

Sesuai dengan amanat undang – undang Nomor 17 tahun 2003, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi yang baik, maka kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai ketakutan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan perkembangannya standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini dapat dibedakan menjadi tiga sampai dengan tahun 2003. Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah SAP berbasis kas (*cash basis*), sedang diperiode tahun 2004 sampai dengan 2014 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah SAP berbasis Kas menuju Akrua (*cash towards accrual basis*). Sejak diterbitkannya standar pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah SAP berbasis akrual. Basis akrual adalah konsep pengakuan akuntansi yang didasarkan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi sudah dicatat meskipun transaksi tersebut baru memiliki implikasi penerimaan kas atau pengeluaran kas di masa yang akan datang.

Kualitas suatu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan mempengaruhi hasil dari keputusan tersebut. Oleh karena itu dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) sebagaimana di atur dalam PP No. 24 tahun 2005 dimana untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah diperlukan beberapa karakteristik laporan keuangan yaitu : dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*) keterandaln (*reiable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Sementara untuk dasar dalam pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan tidak hanya mengerti atau memahami informasi yang disajikan tetapi juga harus mampu menilai tingkat keandalan dan dapat diperbandingkan dengan informasi tentang kemungkinan alternative dan pengalaman masa lalu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara terdapat kendala – kendala yang masih ditemukan dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah yakni ketidaksesuaian dalam Menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang dikelola tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar yang berimplikasi pada opini pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap**

kualitas laporan keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu” Seberapa besar standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah untuk mnegetahui seberapa besar standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di harapkan akan bermamfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara penelitian ini dapat menjadi tambahan literature yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat teortis

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara).

3. Manfaat bagi peneliti

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya mengenai standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada pasal 1 ayat 4

Dan ayat 5 bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu prinsip – prinsip akuntansi yang di tetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang di sajikan untuk pemerintah.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah wujud pelaksanaan dari undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 32 ayat (2) menyatakan”SAP disusun oleh suatu komite standar yang independent dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan landasan hukum bagi aparaturn pemerintah pusat ataupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Standar akuntansi pemerintah adalah suatu standar pedoman prinsip - prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun

daerah. Sehingga dengan adanya standar akuntansi maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini, (dikutip dari skripsi Zeine,2016).

Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan Bersama Sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, standar akuntansi pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. (Zeyn,2011).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang di capai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (SAP).

2.1.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Beberapa definisi menurut para ahli:

Menurut Baswir (2000) akuntansi pemerintahan (termaksud akuntansi untuk lembaga nonprofit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan Lembaga pemerintahan dan Lembaga – Lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun Lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan tergolong sebagai Lembaga mikro.

Menurut Arif dkk (2002) yaitu akuntansi pemerintah sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Menurut Halim (2002) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak – pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah Tindakan.

Dari uraian beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah bagian akuntansi yang berkaitan dengan Lembaga pemerintah atau Lembaga pemerintahan atau juga Lembaga – Lembaga lainnya yang bertujuan untuk tidak mencari laba, untuk menghasilkan informasi laporan keuangan pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi pemerintahan

Tujuan akuntansi pemerintahan menurut bachtiar arif dkk adalah :

1. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan memungkinkan pemerintah, keuangan negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia di atur dalam UUD 1945 Ps 23 Ayat (5).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang – undangan, efisien, efektivitas, dan ekonomis.

3. Pengawasan

pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu:

1. Pertanggungjawaban Memberikikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit – unit pemerintahan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.1.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika di bandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah di atas, Bachtiar dkk (2002) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan

yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
- b. Pemerintah membukukkan anggaran Ketika anggaran tersebut di bukukan.
- c. Dalam akuntansi pemerintahan di mungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.

- d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
- e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang – undangan.
- f. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

2.1.1.4 Syarat Akuntansi Pemerintahan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan bangsa – bangsa mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan (manual governmental Accounting) yang dapat diringkas sebagai berikut (dalam Arif dkk,2002):

1. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan Lain.

Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU dan peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis disatu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU dan peraturan lainnya.

2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran.

Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan Lembaga legislatif. Fungsi

anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi didalam pengelolaan keuangan negara serta integritasnya.

3. Perkiraan yang harus diselenggarakan.

Sistem akuntansi pemerintah harus mengembangkan perkiraan – perkiraan untuk mencatat transaksi yang terjadi, perkiraan – perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi obyek, tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

4. Memudahkan pemeriksaan oleh aparaturnegara.

Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya

5. Sistem akuntansi harus dikembangkan.

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efesieni, efektivitas dan relevansi.

6. Perkiraan – perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif.

Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan – perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapka hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.

7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program.

Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna informasi keuangan yaitu pemerintah, rakyat (Lembaga legislative), Lembaga donor, bank dunia, dan lain sebagainya.

8. Pengadaan suatu perkiraan.

Perkiraan – perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi – transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan – perkiraan nasional.

2.1.1.5 Laporan keuangan pemerintah

Definisi laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 sebagai berikut. “ laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Komponen dan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi APBD (LRA)
- b. Neraca
- c. Catatan atas laporan keuangan
- d. Laporan arus kas (LAK)
- e. Perubahan saldo anggaran lebih (PSAL)
- f. Laporan operasional

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggara akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP), yaitu SAP di beri judul, nomor dan tanggal efektif.

Prinsip akuntansi dan laporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam melakukan kegiatannya serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah.

- a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk mengakui pendapatan LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima direkening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Namun bila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau di bayar.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar sejumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal lain tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*realization*)

Bagi pemerintahan pendapatan berbasis kas yang tersedia yang telah diteoritkan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotoritas melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Subtansi mengguli bentuk formal (*substance over from*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Periodesitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode – periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran yang dianjurkan.

f. Konsistensi (*konsistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama di terapkan pada kejadian yang serupa satu periode ke periode oleh satuan entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*one devace*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*fair presentation*)

Laporan keuangan ini menyajikan dengan wajar laporan learisasi anggaran, laporn perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan

arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, factor pertimbangan sehat dapat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.3 karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Penyusunan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu, tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermamfaat bagi Sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi. Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut diantaranya penjelasan menurut PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

a) Andal

Informasi andal dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, penyajian setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Jika penyajiannya tidak dapat di andalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.

b) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masalalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah di katakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintaah harus menggunakan format atau bentuk atau istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

d) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat di bandingkan laporan keuangan atas periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta dapat membandingkan laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahanya secara efektif.

2.1.4 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handa; tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Komang 2014). Sejalan dengan hal tersebut akuntabilitas public adalah kewajiban agen atau pemerintah untuk mengelola sumber daya melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pemberi mandate atau principal, (Mahmudi 2010).

Menurut LAN dan BPKP (LAN dan BPKP,2000) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang / badan hukum /pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Ledvina (1991) Mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sdah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.

Menurut Hamid (2007) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki haka tau kewajiban atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Suyanto (2010) akuntabilitas merupakan kunci dari konsep *good governance*, untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, dan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut Haque (1997) akuntabilitas dikaitkan dengan meningkatnya tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah yaitu dengan mendorong terciptanya iklim yang dapat merealisasikan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan untuk lebih berakuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya.

Menurut (Mahmudi 2013) Ada empat dimensi akuntabilitas terbagi ke dalam lima bagian antara lain:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga – Lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan dana public harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban Lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas

dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi public adalah menjadi tanggung jawab Lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer nya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat di capai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan – kebijakan yang di ambil. Lembaga – Lembaga public hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

5. Akuntabilitas finansial (*financial accountability*)

Akuntabilitas dalam financial adalah pertanggungjawaban Lembaga – Lembaga public untuk menggunakan dana public (*money public*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Sedangkan dalam Menyusun evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, harus berdasar pada indikator – indikator tertentu. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yg memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yg telah ditetapkan dengan memperhatikan :

1. Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yg diharapkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan peraturan perundang undangan dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*output*) merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yg dapat berupa fisik dan atau non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif dan negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.1.4.1 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan public terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan public terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan public yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan.

Mardiasmo (2014) menyatakan tujuan utama akuntabilitas yaitu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah daerah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi yakni akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal. akuntabilitas vertical merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, contohnya pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas dan menyangkut hubungan antar sesama pengelola laporan keuangan, (Haryanto,2007).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Budhi Purwantoro Jati 2019	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian ini Menunjukkan Bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di pengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. hasil ini di buktikan dengan proksi penerapan ASP akrual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap proksi opini BPK.
2	Tri Ikyarti Nila Aprila 2019	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem informasi manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma	Hasil penelitian ini Menunjukkan Bahwa penerapan standar standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang

			disajikan oleh pemerintah daerah.
3	Daniel Kartika Adhi Yohanes suhardjo 2013	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas aparatur Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada pemerintah kota tual)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota tual.

2.2 Kerangka Pemikiran

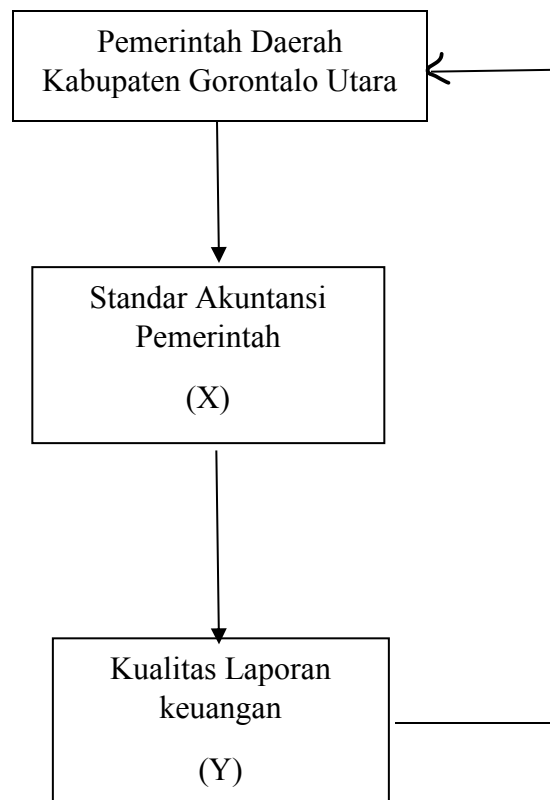
Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2014) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai indikator yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah,. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, yaitu pemerintah pusat , pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah

daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah jika menurut perundang – undangan organisasi dimaksud menyajikan laporan keuangan.

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan Pustaka yang di kemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mencoba mengembangkan satu pemikiran tentang Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2009) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berlakunya peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Menyatakan bahwa laporan dari pemerintah pusat dan daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan yang di hasilkan Lembaga pemerintah akan lebih mudah dipahami serta dapat diukur tingkat kualitasnya berdasarkan SAP yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu

Ha: Standar Akuntansi Pemerintah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Ho: Standar Akuntansi Pemerintah (X) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya objek dalam penelitian ini adalah pengaruh standar akuntansi pemerintah (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Y) Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Tempat penelitian : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten
Gorontalo Utara

Waktu Penelitian : Januari 2022

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Sugiono (2006) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dengan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri – ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, menurut Sugiono (2010) penelitian kuantitatif merupakan metode yang penelitiannya mengukur subjek penelitian dengan tepat. Teknik pengumpulannya menggunakan sampel dan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Penelitian melibatkan dua variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat dari penelitian ini adalah penerapan standar standar akuntansi pemerintah sedangkan variabel bebas penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.2.2 Operasional Variabel

judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” maka terdapat dua variabel penelitian yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu prinsip – prinsip akuntansi yang di tetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah.
2. Kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Untuk lebih muda dalam memahami variabel penelitian yang digunakan, maka peneliti menjabarkan kedalam bentuk operasionalisasi variabel yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 operasional variabel X

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	Prinsip yang di gunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis akuntansi 2. Nilai historis (historical cost) 3. Realisasi (realization) 4. Subtansi mengunggli bentuk formal (substance over From) 5. Periodeitas (periodicity) 6. Konsistensi (consistency) 7. Pengungkapan lengkap (full disclosure) 8. Penyajian wajar (fair presentation) 	Ordinal

Sumber : komite standar akuntansi pemerintahan (2020)

Tabel 3.2 Operasional variabel Y

Variabel	Sub variabel	Indikator	Skala
Kualitas laporan keuangan (Y)	Karakteristik laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andal 2. Relevan 3. Dapat dipahami 4. Dapat dibandingkan 	Ordinal

Sumber: standar akuntansi pemerintah PP 71 tahun 2010

Dalam mengukur setiap variabel yang dikemukakan pada tabel diatas maka akan dibuatkan kusioner dengan menggunakan skala likert. Dalam kusioner akan disiapkan 5 (lima) pilihan jawaban, dan setiap pilihan jawaban akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti yang tampak pada taebel berikut:

Tabel 3.3 Bobot nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Sangat Tidak Setuju	4
Tidak Setuju	3
Setuju	2
Sangat Setuju	1

3.2.3 Populasi dan Sampel

3.2.3.1 populasi

Menurut Sugiono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kantor dinas yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 3.4 Populasi Penelitian

Nama SKPD	Jumlah
-----------	--------

Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Utara	1
Sekretariat DPRD kabupaten Gorontalo Utara	1
Inspektorat daerah kabupaten Gorontalo utara	1
Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga	1
Dinas pendapatan pengelola keuangan dan asset daerah	1
Dinas perumahan rakyat Kawasan pemukiman dan pertanahan	1
Dinas koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan	1
Dinas kesehatan	1
Dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan	1
Dinas perternakan dan Kesehatan hewan	1
Dinas kehutanan, pertambangan dan energi	1
Dinas kelautan dan perikanan	1
Dinas Perhubungan	1
Dinas kebudayaan dan pariwisata	1
Dinas social	1
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	1
Dinas kependudukan dan catatan sipil	1
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	1
Dinas kearsipan dan perpustakaan	1
Dinas lingkungan hidup	1
Dinas komunikasi dan informatika	1
Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	1
Dinas satpol PP dan kebakaran	1

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1
Kantor pertanahan	1
Badan keuangan	1
Badan penanggulangan bencana daerah	1
Badan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	1
Kesbangpol	1
Jumlah	30

3.2.3.2 Sampel

Sampel menurut Sugiono (2014) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pertimbangannya Sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian. Sehingga, Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *stratified random sampling*, adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan (strata) pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan (stratifikasi) berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam *stratified random sampling* elemen populasinya di kelompokkan pada tingkatan – tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2010) jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya di ambil semuanya,

Berdasarkan penelitian tersebut maka sampel dari penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yaitu kepala subbagian keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara :

Tabel 3.5 Sampel Penelitian

Nama SKPD	Jumlah
Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	1
Sekretariat DPRD kabupaten Gorontalo Utara	1
Inspektorat daerah kabupaten Gorontalo utara	1
Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga	1
Dinas pendapatan pengelola keuangan dan asset daerah	1
Dinas pekerjaan umum	1
Dinas koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan	1
Dinas kesehatan	1
Dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan	1
Dinas perternakan dan Kesehatan hewan	1
Dinas kehutanan, pertambangan dan energi	1
Dinas kelautan dan perikanan	1
Dinas Perhubungan	1
Dinas kebudayaan dan pariwisata	1
Dinas social	1
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	1
Dinas kependudukan dan catatan sipil	1
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	1
Dinas kearsipan dan perpustakaan	1
Dinas lingkungan hidup	1
Dinas komunikasi dan informatika	1
Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	1
Dinas satpol PP dan kebakaran	1
Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1
Kantor pertanahan	
Badan keuangan	1
Badan penanggulangan bencana daerah	1
Badan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	1
Kesbangpol	1
Jumlah	30

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1 Jenis Data

1. Data kuantitatif merupakan data berupa bilangan yang nilainya berubah – ubah atau bersifat variative.
2. Data kualitatif merupakan data yang bukan dihitung atau bukan berupa angka – angka atau catatan, melainkan laporan atau arsip yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak instansi atau perusahaan, serta informasi – informasi lainnya dari pihak lain.

3.2.4.2 Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kusioner oleh peneliti.
2. Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, yang diperoleh dari sumber ekstern lain yang relevan dan diperoleh

melalui literatur, serta jurnal yang berkaitan dengan topik Bahasa peneliti

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kusioner.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara merupakan cara mengajukan pertanyaan kepada pimpinan atau pegawai yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.
3. Kusioner merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden memberikan respon atas pertanyaan tersebut.
4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori – teori dan konsep – konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.6 Prosedur Penelitian

3.2.6.1 Uji Validitas

Peneliti melakukan uji validitas agar mengetahui apakah instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur variabel yang dimaksud. Menurut Sugiyono (2012) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, sehingga pengujian validitas yang digunakan berupa validitas isi (*content validity*). Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dan materi pelajaran yang telah diajarkan. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

Perhitungan secara statistik dapat dibandingkan dengan tabel r *Product Moment*, dengan pengukuran sebagai berikut:

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XiYi) - (\sum Xi).(\sum Yi)}{\sqrt{(n.\sum Xi^2 - (\sum x)^2)(n\sum Yi^2 - (n\sum Yi)^2)}}$$

Keterangan:

r_{hitung} = Koefisien korelasi antara pengubah X dan pengubah Y, dua pengubah yang dikorelasikan

Xi = Jumlah skor item

Yi = Jumlah skor total (Seluruh item)

n = Banyaknya sampel

Distribusi (Tabel r) untuk $\alpha = 0.05$ dan derajat kebebasan ($dk = n-2$) kaidah keputusan :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item-item kuesioner valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item-item kuesioner tidak valid.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dapat diketahui dengan menggunakan koefisien Guilford, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Koefisien Guilford

Koefisien korelasi	Korelasi	Interpretasi Validitas
$0,90 \leq 1,00$	Sangat tinggi	Sangat tepat / sangat baik
$0,70 \leq 0,90$	Tinggi	Tepat baik
$0,40 \leq 0,70$	Sedang	Cukup tepat / cukup baik
$0,20 \leq 0,40$	Rendah	Tidak tepat / buruk
$\leq 0,20$	Sangat rendah	Sangat tidak tepat / sangat tidak baik

Sumber : Guilford dalam lestari & yudhanegara, 2017

3.2.6.2 Uji Reabilitas

Koefisien reabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total

skor ganjil lawan total skor genap, selanjutnya dihitung reabilitasnya menggunakan rumus “alpha cronbach”. Menurut Gozhali (2005) dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_t^2}{S_t^2} \right)$$

Keterangan :

k = jumlah instrument pertanyaan

$\sum S_t^2$ = jumlah varians dalam setiap instrument

s_t^2 = varians keseluruhan instrumen

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2005). Semakin nilai alpanya mendekati satu maka nilai reabilitas datanya semakin tercapai.

3.2.6.3 Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Perlu diketahui, terdapat kemungkinan data aktual tidak memenuhi semua asumsi klasik ini. Beberapa perbaikan, baik pengecekan kembali data *outlier* maupun *recollecterror data* dapat dilakukan.

3.2.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab

akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Pengujian terhadap hipotesis baik secara parsial maupun simultan, dilakukan setelah model regresi yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien.

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

X = standar akuntansi pemerintah

β = Koefisien regresi variabel independen

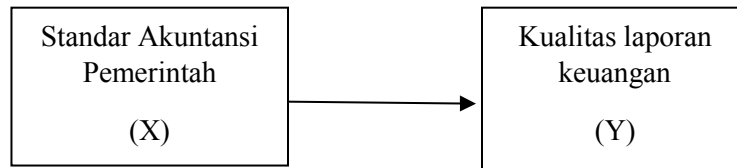
e = variabel pengganggu

3.2.8 Pengujian Hipotesis

1. Rancangan Uji Hipotesis

Untuk memastikan apakah pengaruh standar akuntansi pemerintah (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara. Maka pengujian

dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode regresi sederhana dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2
Model Analisis Regresi Sederhana

2. Uji Statistik

Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut: $H_1: \beta_1 > 0 \rightarrow$ berpengaruh positif, $H_1 : \beta_1 < 0 \rightarrow$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variable X terhadap Y. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_1 tidak diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan

untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5 %.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara

PERTAMA, Musyawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara (BMPDGU) di Kecamatan Kwandang pada tanggal 15-17 Desember 1966. Dihadiri pemuka-pemuka Parpol, Orpol, Ormas, unsur-unsur Daerah serta pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Musjawarah ini melahirkan “Resolusi Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara”

KEDUA, BMPDGU melayangkan Surat Tuntutan No. 14/BMPDGU/68 Pokok Tuntutan Eks Kewedanaan Kwandang (Kwandang, Sumalata, Atinggola) menjadi Kab. Gorontalo Utara, yang ditujukan kepada : 1). Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo di Limboto, (2). Ketua DPRGR Kab. Gorontalo di Limboto, (3). Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sultara di Manado, (4). Menteri Dalam Negeri di Djakarta dan (5) Ketua DPRGR RI di Djakarta. Perjuangan awal ini dipimpin oleh SH. Puti dan Abdulkadir Uno, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara.

Perjuangan pembentukan Kabupaten di wilayah Pantai Utara Gorontalo ini bergema lagi di akhir 2001, dengan nama Kabupaten Pantura. Terbentuklah Komite Pembentukan Daerah Pantura Gorontalo atau KOPDA PG di bawah pimpinan (alm) Drs. Hamid Dunggio dan Muhtajim Boki, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum, KOPDA-PG. Ketua Dewan Kehormatan Muhtar Darise didampingi Sekretaris Dewan Kehormatan Thomas Mopili. Di episode ini, isu Kabupaten Pantura sempat berhembus cukup kencang, tapi kemudian redup pada tahapan sosialisasi sebab ada pihak-pihak tertentu, baik unsur pejabat pemerintah maupun segelintir masyarakat yang menghalang-halangi.

Pada 20 Desember 2003 terbentuk Tim 7 pasca sosialisasi dana bantuan IDB oleh Pemerintah dan DPRD Kab. Gorontalo di UDKP Kwandang. Bantuan dari Islamic Development Bank dijadikan alat untuk meredam gerakan pembentukan kabupaten Pantura. Terjadi perdebatan antara tokoh masyarakat dengan anggota dewan Kabupaten Gorontalo. Akhirnya forum bubar sosialisasi itu bubar lalu tokoh-tokoh masyarakat kemudian bersepakat membentuk Tim 7 yang diketuai (alm) Husain Udit dan Sekretaris Rahmat J. Kasim. Tugas Tim 7 melakukan sosialisasi pembentukan Kabupaten Pantura dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari 5 kecamatan.

Pada 27 Desember 2003 berlangsung Halal Bi Halal dan Pemantapan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Pantura Gorontalo di UDKP Kwandang. Dalam momentum inilah tokoh akademisi Thariq Modanggu didaulat menjadi Ketua Panitia Pemekaran Pantura, didampingi Sekretaris Jost Pomalingo.

Di episode inilah perjuangan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan secara Cerdas, komprehensif, sistematis, taktis-strategis, dan simpatik. Dengan inilah KPK Gorut melaksanakan berbagai agenda lain sebagai berikut:

1. Bersilaturahmi dan meyakinkan Bupati Kabupaten Gorontalo Ahmad Hoesa Pakaya
2. Sosialisasi perjuangan ke seluruh wilayah kecamatan di Pesisir Utara Gorontalo
3. Deklarasi akbar pembentukan Kabupaten Pantura pada 23 Januari 2013 di Lapangan Aroma Moluo (sekarang masjid Baiturrahim Gorontalo Utara). Di banjiri ribuan massa dari 5 kecamatan. Dihadiri Gubernur Fadel Mohamad,

Gorontalo, sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten se Provinsi Gorontalo, serta dihadiri budayawan nasional Taufik Ismail. Peristiwa akbar ini diwarnai antara lain:

- a. Penandatanganan 500meter Spanduk oleh Gubernur Gorontalo, diikuti undangan dan berbagai tokoh masyarakat yang membanjiri lapangan Moluo.
 - b. Penandatanganan Komunike bersama oleh elemen masyarakat yang menyatakan lahirnya kabupaten Pantura.
 - c. Pembacaan Pidato Iftitah oleh Prof.DR.Nani Tuloli
 - d. Deklarasi Pembentukan Kabupaten Pantura Oleh Thariq Modanggu,S.Ag.M.PdI
 - e. Penandatanganan persetujuan deklarasi pembentukan Kabupaten Pantura oleh pejabat daerah yang hadir.
4. Ber-audiensi dan mempressure Rekomendasi dukungan DPRD Kab. Gorontalo untuk membentuk Kabupaten Pantura
 5. Mempresentasikan proposal kelayakan Kab. Pantura pada Sidang Paripurna Khusus DPRD Kab.Gorontalo.
 6. Mempressure dan mengawal keluarnya Rekomensi/Usulan Bupati Gorontalo No. 125/01/376/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pantura masing-masing kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo.
 7. Mempressure dan mengawal lahirnya Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo No. 01 Tahun 2004 tentang Rekomendasi Pembentukan Kab. Gorontalo Pantura.

8. Mempersiapkan dan mengawal lahirnya Rekomendasi/Usul Gubernur Gorontalo No. 135/Pem/389/2004 tentang Pembentukan Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Mengajukan mengajukan Proposal Kelayakan Pembentukan Gorontalo Utara dan Rekomendasi Pemerintah/DPRD Kabupaten/Provinsi ke Komisi II DPR-RI di Jakarta.
10. Melakukan persiapan dan menerima kunjungan lapangan Komisi II DPR RI meninjau wilayah calon Kab. Pantura.
11. Melakukan serangkaian agenda strategis dan gerakan top secret dalam menghadapi moratorium pemekaran daerah sebagaimana tertuang dalam Edaran Mendagri No. 135, 8 Maret 2004, perihal Penghentian Sementara pemekaran untuk waktu yang tidak ditentukan.
12. Melaksanakan Seminar Penentuan Nama dan Ibu Kota di Aula Serba Guna Satrad 256 Kwandang dihadiri oleh wakil-wakil kecamatan di pesisir Utara Gorontalo, dengan narasumber DR. Nani Tuloli dan Ir. Alim Niode, M.Si.
13. Mengawal lahirnya Surat Keputusan DPRD Kab. Gorontalo No. 13 Tahun 2004 tentang Nama Kabupaten Gorontalo Utara dan letak Ibukota (Kwandang), dan Keputusan DPRD Gorontalo No. 14 Tahun 2004 tentang Dukungan Dana untuk Kabupaten Gorontalo Utara.
14. Bersama-sama dengan 12 anggota DPRD Kab. Gorontalo melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR-RI untuk membahas/mempertanyakan pemekaran Gorontalo Utara.

15. Mempresure dan mengawal Keputusan Gubernur Gorontalo No. 117 Tahun 2004 tentang Dukungan Dana dari pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Kabupaten Gorontalo Utara, dan Rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo No. 160/DPRD/128/2004 tentang Dukungan Dana bagi Kabupaten Gorontalo Utara.
16. Melakukan pendekatan dan lobi-lobi politik ke pimpinan DPR-RI, melalui mediasi tokoh politik (almarhumah Rostina Abadi), dengan bermodalkan ikan kering-ikan garam.
17. Menerbitkan tabloid “Suara Rakyat”. Media informasi perjuangan ini hanya sempat terbit dua edisi lantaran keterbatasan dana perjuangan.
18. Mempersiapkan dan mengawal kunjungan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ke wilayah Gorontalo Utara. Alhamdulillah Calon Kabupaten Gorontalo Utara menempati rangking I dari aspek kelengkapan administrasi dari 54 daerah calon pemekaran.
19. Bersama-sama dengan Pemerintah Kab.Gorontalo mempresentasikan Kelayakan dan Kesiapan Gorontalo Utara menjadi satu kabupaten dalam Rapat Panitia AD Hoc I DPD RI.
20. Ketua KPK Gorut menyajikan poin-poin kunci kelayakan Gorontalo Utara menjadi satu kabupaten, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR RI.
21. Mempersiapkan lokasi kunjungan lapangan DPD RI untuk melihat dari dekat kesiapan Gorontalo Utara untuk menjadi sebuah daerah otonom.

22. Membuat film dokumenter yang berjudul “39 TAHUN: Sebuah Penantian” sebagai media yang ampuh untuk meyakinkan pemerintah pusat.
23. Memaksimalkan data-data lapangan Gorontalo Utara untuk mensupport Pemda Kabupaten dan Provinsi Gorontalo dalam menyahuti edaran DPR-RI tentang Pemutakhiran Data Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom.
24. Ketua KPK Gorut bersama-sama LO Provinsi Adrian Lahay, LO Kab. Gorontalo Amin Musa menyampaikan surat Bupati Gorontalo dan Gubernur ke Komisi II DPR-RI dan Menteri Dalam Negeri.
25. Ketua KPK Gorut dibantu Hardi Nurdin merancang dan menyusun Naskah Akademik sebagai prasyarat keluarnya RUU Kabupaten Gorontalo Utara usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI.
26. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPD RI) menetapkan RUU Kab. Gorontalo Utara sebagai usul inisiatif DPD RI.
27. KPK Gorut menyampaikan “Capaian Perjuangan dan Antisipasinya” kepada Gubernur Fadel Mohamad
28. Gubernur mengajak KPK ber-audiensi dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono. Didampingi Ketua DPRD Gorontalo bersama Pimpinan-pimpinan Fraksi, LO Provinsi dan Rektor UNG Nelson Pomalingo.
29. KPK Gorut menghimpun dukungan politik dari Partai-partai di Provinsi Gorontalo, lalu diajukan ke fraksi-fraksi di DPR-RI dan juga ke DPP masing-masing Partai.

30. KPK Gorut bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima kunjungan Tim Kerja Komisi II DPR-RI untuk melihat secara langsung kesiapan menjadi Daerah Otonomi Baru.
31. Akhirnya, pada hari Jum'at 8 Desember 2006, pukul 11.45 tangisan pertama bayi Kabupaten Gorontalo Utara bergema di Gedung Nusantara II DPR-RI ketika Paripurna DPR-RI ketuk palu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara.

KPK Gorut menggelar agenda MSMG “Menuju Senayan Menjemput Gorut” KPK memobilisir lebih dari 100 orang dengan berbagai elemen masyarakat menghadiri momentum sakral pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Dua buah spanduk KPK Gorut mencuri perhatian ribuan orang di DPR (termasuk pendukung 16 daerah yang disahkan DPR-RI. Spanduk pertama, “Di Nusantara II Gorontalo Utara dilahirkan, Di Gorontalo Utara Nusantara Dibesarkan”. Spanduk kedua, “40 Tahun Impian Rakyat Gorontalo Utara Terwujud Disini”

KPK Gorut tidak berpuas diri atas terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara. Maka, KPK Gorut menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUBES) II Rakyat Gorontalo Utara. Musyawarah Rakyat ini sebagai kelanjutan dari Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara pada 15-17 Desember 1966 (MUBES I). Produk MUBES I adalah RESOLUSI Tuntutan Menjadi Kabupaten Gorontalo Utara, sedang kan MUBES II produknya adalah RESOLUSI PANTURA (Singkatan dari Pernyataan Amanat Tuntutan Rakyat).

KPK Gorut bekerja sama dengan RRI Gorontalo melaksanakan Dialog Interaktif dengan tema: “Menegaskan kembali cita-cita pembentukan kab. Gorontalo Utara sekaligus penguatan komitmen untuk mewujudkannya “ Disiarkan secara langsung oleh RRI Gorontalo dari rumah salah satu Tokoh Pejuang Gorontalo Utara “alm. Husain Udit”

Pengresmian dan Pelantikan Penjabat Bupati Gorontalo Utara oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo A.S Atas nama Presiden Republik Indonesia. KPK Gorut menggelar Stand Pameran Perjuangan dan Meluncurkan Tabloid Suara Rakyat.

Setelah ditetapkannya Provinsi Gorontalo sebagai wilayah mekaran dari Propinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Desember 2000, Kabupaten Gorontalo menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo sebelumnya telah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran ke dua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara. Luas Wilayah : 1.676,15 Km² Jumlah Penduduk : 120.863 Jiwa.

4.1.2 Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kekuatan Utama perekonomian di pantai utara.

MISI

1. Mengembangkan Potensi Kualitas sumber daya manusia kabupaten Gorontalo utara
 2. Menurunkan Angka kemiskinan, Pengangguran dan ketertinggalan
 3. Mengembangkan system perekonomian yang tangguh berbasis kerakyatan (Gerbang Emas) Gerakan Pembangunan Ekonomi masyarakat
 4. Mengembangkan Nilai nilai Religi dalam konteks keberagaman adat istiadat / nilai nilai Budaya
- Menciptakan jejaring kerjasama ekonomi dengan menjadikan Gorontalo utara sebagai daerah Lintas Pengembangan perekonomian segitiga Emas

4.1.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km²; (data SP 2010, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km²;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang tersebar pada ketinggian 0 – 1.800 meter diatas permukaan laut, Keadaan topografi didominasi oleh kemiringan 15-40 ° (60 -70 %). Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan Kabupaten Gorontalo Utara rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi dan gelombang pasang serta pendangkalan dan banjir. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki garis panjang pantai 198,00 Km² yang menjadi garis pantai terpanjang di provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudra Pasifik

Iklim di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam tipe C dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 2.267 mm/tahun dengan temperatur udara rata-rata 32° C dengan temperatur tertinggi 33,9° C terjadi pada bulan Maret dan temperatur terendah 23° C terjadi pada bulan Februari

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif

Dari 30 responden pada penelitian ini dapat dikemukakan identitas responden sebagai berikut:

4.2.1.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara penelitian kepada responden yang telah ditentukan (Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner) yang telah disebar langsung. Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 30 responden yang memenuhi standar sampel penelitian. Kuesioner disebar kemudian ditunggu oleh peneliti sehingga kuesioner yang kembali sebanyak 30 kuesioner. Rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner (*response rate*) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 :Rincian Pengiriman dan Pengembalian Angket

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	30
Kuesioner yang kembali	30
Kuesioner yang dapat digunakan	30
Kuesioner yang tidak kembali	0
Tingkat pengembalian yang digunakan $(30/30 \times 100\%)$	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dan dapat digunakan (*respon use*) sebesar 100%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner yang kembali dan dapat digunakan (30 kuesioner) dibagi total yang dikirim (30 kuesioner).

1) Responden Menurut Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin dapat menjadi pembeda bagi seseorang pegawai dalam bekerja. Berikut ini jumlah responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Ferekuensi	Persentase
Laki – laki	12	40.0 %
Perempuan	18	60.0 %
Total	30	100%

Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan table 4.2 menunjukan bahwa jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 12 orang atau 40.00% sedangkan responden perempuan adalah sebanyak responden 18 orang atau 60.00%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara didominasi oleh perempuan.

2) Responden Menurut Umur

Adapun umur responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3: Data Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
21-30 Thn	10	33.33 %
31-40 Thn	20	66,67 %
41-50 Thn	0	0 %
51 thn keatas	0	0%
Total	30 orang	100

Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian responden berusia antara 31-40 tahun dengan jumlah 30 orang atau 66.67%, usia tersebut adalah usia yang tergolong usia pasangan rumah tangga sesuai dengan kondisi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang tertuju kepada pegawai. (Sardiman, 2009) menyatakan Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun – 30 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden berada pada usia produktif.

4.2.2 Karakteristik Variabel Penelitian

Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel Kinerja pegawai (Y). Bobot-Bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot *option* (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih. Sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot *option* dengan frekuensi. Berikut Proses perhitungannya.

Bobot Terendah X Item X Jumlah Responden : $1 \times 1 \times 30 = 30$

Bobot Tertinggi X Item X Jumlah Responden : $4 \times 1 \times 30 = 120$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Rentang Skalanya yaitu

$$\frac{120 - 30}{4} = 22,5 = 23$$

Tabel 4.4. Tabel skala penelitian jawaban responden

No	Nilai Skor	Intrepretasi	Keterangan
1	30 – 53	Berada pada kategori daerah sangat tidak setuju	STS
2	54 - 77	Berada pada kategori daerah tidak setuju	TS
3	78 – 101	Berada pada kategori daerah setuju	S
4	102 – 120	Berada pada kategori daerah sangat setuju	SS

Sumber : Hasil Olahan Data 2022

Berikut ini akan disajikan gambaran hasil tabulasi data atau variabel yang menjadi objek penelitian.

1) Standar Akuntansi Pemerintah (X)

Hasil Tabulasi data variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X) yang diisi oleh 30 responden (sampel) dapat divisualisasikan melalui tabel berikut:

Tabel 4.5. Jawaban Responden tentang Standar Akuntansi Pemerintah (X)

Bobot	X1			X2			X3			X4		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
4	3	12	10	6	24	20	7	28	23.3	13	52	43.3
3	13	39	43.33	13	39	43.3	19	57	63.3	15	45	50
2	11	22	36.67	9	18	30	4	8	13.3	2	4	6.67
1	3	3	10	2	2	6.67	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	76	100	30	83	100	30	93	100	30	101	100
Kategori	TS			S			S			S		
Bobot	X5			X6			X7			X8		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
4	7	28	23.33	12	48	40	9	36	30	9	36	30
3	18	54	60	17	51	56.7	19	57	63.3	20	60	66.7
2	5	10	16.67	1	2	3.33	2	4	6.67	1	2	3.33
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	92	100	30	101	100	30	97	100	30	98	100
Kategori	S			S			S			S		

Bobot	X9			X10			X11		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
4	13	52	43.33	3	12	10	5	20	16.7
3	11	33	36.67	19	57	63.3	18	54	60
2	4	8	13.33	6	12	20	7	14	23.3
1	2	2	6.667	2	2	6.67	0	0	0
Jumlah	30	95	100	30	83	100	30	88	100
Kategori	S			S			S		
Bobot	X12			X13			X14		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
4	17	68	56.67	13	52	43.3	5	20	16.7
3	12	36	40	15	45	50	20	60	66.7
2	1	2	3.333	2	4	6.67	5	10	16.7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	106	100	30	101	100	30	90	100
Kategori	SS			S			S		

Sumber : Data Olahan lampiran 2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel standar akuntansi pemerintah (X) dari 30 responden yang menjawab untuk setiap kusioner, untuk item pernyataan 1 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 3 orang, dengan skor 12, dengan jumlah presentase 10 %, untuk bobot 3 sebanyak 13 orang, dengan skor 39, dengan jumlah presentase 43,33 %, untuk bobot 2 sebanyak 11 orang, dengan skor 22, dengan jumlah presentase 10 %, untuk bobot 1 sebanyak 3 orang, dengan jumlah skor 3, dengan jumlah presentase 10 %.

Untuk item pernyataan 2 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 6 orang, dengan skor 24, dengan jumlah presentase 20 %, untuk bobot 3 sebanyak 13 orang,

dengan skor 39, dengan jumlah presentase 43,3 % untuk bobot 2 sebanyak 9 orang, dengan skor 18, dengan jumlah presentase 30 %, untuk bobot 1 sebanyak 2 orang, dengan skor 2, dengan jumlah presentase 6,67 %.

Untuk item pernyataan 3 yang menjawab bobot 4 sebanyak 7 orang, dengan skor 28, dengan jumlah presentase 23,3 %, untuk bobot 3 sebanyak 19 orang, dengan skor 57, dengan jumlah presentase 63,3 %, untuk bobot 2 sebanyak 4 orang, dengan skor 8, dengan jumlah presentase 13,3 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 4 yang menjawab bobot 4 sebanyak 13 orang, dengan skor 52, dengan jumlah presentase 43,3 %, untuk bobot 3 sebanyak 15 orang, dengan skor 45, dengan jumlah presentase 50 %, untuk bobot 2 sebanyak 2 orang, dengan skor 4, dengan jumlah presentase 6,67 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 5 yang menjawab bobot 4 sebanyak 7 orang, dengan skor 28, dengan jumlah presentase 23,33 %, untuk bobot 3 sebanyak 18 orang, dengan skor 54, dengan jumlah presentase 60 %, untuk bobot 2 sebanyak 5 orang, dengan skor 10, dengan jumlah presentase 16,67 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 6 yang menjawab bobot 4 sebanyak 12 orang, dengan skor 48, dengan jumlah presentase 40 %, untuk bobot 3 sebanyak 18 orang, dengan skor 51, dengan jumlah presentase 56,7 %, untuk bobot 2 sebanyak 1 orang, dengan skor 2, dengan jumlah presentase 3,33 %. Untuk bobot 1 tidak memiliki responden

Untuk item pernyataan 7 yang menjawab bobot 4 sebanyak 9 orang, dengan skor 36, dengan jumlah presentase 30 %, untuk bobot 3 sebanyak 19 orang, dengan

skor 57, dengan jumlah presentase 63, 3 %, untuk bobot 2 sebanyak 2 orang, dengan skor 4, dengan jumlah presentase 6,67 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 8 yang menjawab bobot 4 sebanyak 9 orang, dengan skor 36. Dengan jumlah presentase 30 %, untuk bobot 3 sebanyak 20 orang, dengan skor 60, dengan jumlah presentase 66,7 %, untuk bobot 2 sebanyak 1 orang, dengan skor 2, dengan jumlah presentase 3,33 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 9 yang menjawab bobot 4 sebanyak 13 orang, dengan skor 52, dengan jumlah presentase 43,33 %, untuk bobot 3 sebanyak 11 orang, dengan skor 33, dengan jumlah presentase 36,67 %, untuk bobot 2 sebanyak 4 orang, dengan skor 8, dengan jumlah presentase 13,33 %, untuk bobot 1 sebanyak 2 orang, dengan skor 2, dengan jumlah presentase 6,667 %.

Untuk item pernyataan 10 yang menjawab bobot 4 sebanyak 3 orang, dengan skor 12 orang, dengan jumlah presentase 10 %, untuk bobot 3 sebanyak 19 orang, dengan skor 57, dengan jumlah presentase 63,3 %, untuk bobot 2 sebanyak 6 orang, dengan skor 12, dengan jumlah presentase 20 %, untuk bobot 1 sebanyak 2 orang, dengan skor 2, dengan jumlah presentase 6,67 %.

Untuk item pernyataan 11 yang menjawab bobot 4 sebanyak 5 orang, dengan skor 20, dengan jumlah presentase 16, 7 %, untuk bobot 3 sebanyak 18 orang, dengan skor 54, dengan jumlah presentase 60 %, untuk bobot 2 sebanyak 7 orang, dengan skor 14, dengan jumlah presentase 23, 3 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 12 yang menjawab bobot 4 sebanyak 17 orang, dengan skor 68, dengan jumlah presentase 56, 67 %, untuk bobot 3 sebanyak 12 orang,

dengan skor 36, dengan jumlah presentase 40 %, untuk bobot 2 sebanyak 1 orang, dengan skor 2, dengan jumlah presentase 3,333 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 13 yang menjawab bobot 4 sebanyak 13 orang, dengan skor 52, dengan jumlah presentase 43,3 %, untuk bobot 3 sebanyak 15, dengan skor 45, dengan jumlah presentase 50 %, untuk bobot 2 sebanyak 2 orang, dengan skor 4, dengan jumlah presentase 6,67 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 14 yang menjawab bobot 4 sebanyak 5 orang, dengan skor 20, dengan jumlah presentase 16,7 %, untuk bobot 3 sebanyak 20 orang, dengan skor 60, dengan jumlah presentase 66,7, untuk bobot 2 sebanyak 5 orang, dengan skor 10, dengan jumlah presentase 16,7 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Dari 14 item pernyataan di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang paling tinggi adalah item pernyataan ke 12 dengan jumlah skor 106, dengan menggunakan indikator pengungkapan lengkap, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator pengetahuan memberikan kontribusi dominan terhadap variabel standar akuntansi pemerintah.

2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil Tabulasi data variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang diisi oleh 30 responden (sampel) dapat divisualisasikan melalui tabel berikut:

Tabel 4.6. Tanggapan Responden tentang Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Bobot	Y1	Y2	Y3	Y4
-------	----	----	----	----

	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
4	10	40	33.33	11	44	36.7	6	24	20	6	24	20
3	19	57	63.33	19	57	63.3	22	66	73.3	22	66	73.3
2	1	2	3.333	0	0	0	2	4	6.67	2	4	6.67
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30	99	100	30	101	100	30	94	100	30	94	100
Kategori	S			S			S			S		
Bobot	Y5			Y6			Y7			Y8		
	7	28	23.33	13	52	43.3	19	76	63.3	10	40	33.3
4	23	69	76.67	17	51	56.7	11	33	36.7	20	60	66.7
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	30	97	100	30	103	100	30	109	100	30	100	100
Jumlah	7	28	23.33	13	52	43.3	19	76	63.3	10	40	33.3
Kategori	STS			STS			TS			STS		
Bobot	Y9			Y10			Y11			Y12		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
4	8	32	26.67	9	36	30	13	52	43.3	11	44	36.7
3	22	66	73.33	21	63	70	17	51	56.7	19	57	63.3
2	5	10	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	35	108	116.7	30	99	100	30	103	100	30	101	100
Kategori	SS			S			SS			S		

Sumber : Data Olahan lampiran 2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sub variabel kualitas laporan keuangan dari 30 responden yang menjawab item yang menjawab setiap kusioner untuk item pernyataan 1 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 10 orang, dengan skor 40, dengan jumlah presentase 33,33 %, untuk bobot 3 sebanyak 19 orang, dengan skor 57, dengan jumlah presentase 63,33 %, untuk bobot 2 sebanyak 1 orang, dengan skor 2, dengan jumlah presentase 3,333 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 2 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 11 orang, dengan skor 44, dengan jumlah presentase 36,7 %, untuk bobot 3 sebanyak 19 orang, dengan skor 57, dengan jumlah presentase 63,3 %, untuk bobot 2 dan 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 3 yang menjawab dengan bobot sebanyak 6 orang, dengan skor 24, dengan jumlah presentase 20 %, untuk bobot 3 sebanyak 22 orang, dengan skor 66, dengan jumlah presentase 73, 3 %, untuk bobot 2 sebanyak 2 orang, dengan skor 4, dengan jumlah presentase 6,67 %, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 4 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 6 orang, dengan skor 24, dengan jumlah presentase 20 %, untuk bobot 3 sebanyak 22 orang, dengan skor 66, dengan jumlah presentase 73, 3 %, untuk bobot 2 sebanyak 2 orang, dengan skor 4, dengan jumlah presentase 6,67 %. Untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 5 yang menjawab dengan bobot 5 sebanyak 23 orang, dengan skor 69, dengan jumlah presentase 76, 67 %, untuk bobot 3 dan 2 tidak memiliki responden, untuk bobot 1 sebanyak 30 orang, dengan skor 97, dengan jumlah presentase 100 %.

Untuk item pernyataan 6 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 17 orang, dengan skor 51, dengan jumlah presentase 56,7 %, untuk bobot 3 dan 2 tidak

memiliki responden, untuk bobot 1 yang menjawab sebanyak 30 orang, dengan skor 103, dengan jumlah presentase 100 %.

Untuk item pernyataan 7 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 11 orang, dengan skor 33, dengan jumlah presentase 36,7 %, untuk bobot 3 dan 2 tidak memiliki responden, untuk bobot 1 yang menjawab sebanyak 30 orang, dengan skor 109, dengan jumlah presentase 100 %.

Untuk item pernyataan 8 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 20 orang, dengan skor 60, dengan jumlah presentase 66,7 %, untuk bobot 3 dan 2 tidak memiliki responden, untuk bobot 1 sebanyak 30 orang, dengan skor 100 dengan jumlah presentase 100 %.

Untuk item pernyataan 9 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 8 orang, dengan skor 32, dengan jumlah presentase 26,67 %, untuk bobot 3 sebanyak 22 orang, dengan skor 66, dengan jumlah presentase 73, 33 %, untuk bobot 2 sebanyak 5 orang, dengan skor 10, dengan jumlah presentase 16,67, untuk bobot 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 10 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 9 orang, dengan skor 36, dengan jumlah presentase 30 5, untuk bobot 3 sebanyak 21 orang, dengan skor 63, dengan jumlah presentase 70 %, untuk bobot 2 dan 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 11 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 11 orang, dengan skor 52, dengan jumlah presentase 43,3%, untuk bobot 3 sebanyak 17 orang, dengan skor 51, dengan jumlah presentase 56,7, untuk bobot 2 dan 1 tidak memiliki responden.

Untuk item pernyataan 12 yang menjawab dengan bobot 4 sebanyak 11 orang, dengan skor 44, dengan jumlah presentase 36,7 %, untuk bobot 3 sebanyak 19 orang, dengan skor 57, dengan jumlah presentase 63,3 %, untuk bobot 2 dan 1 tidak memiliki responden.

Dari 12 item pernyataan di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang paling tinggi adalah item pernyataan ke 9 dengan jumlah skor 108, dengan menggunakan indikator dapat di pahami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator dapat di pahami memberikan kontribusi dominan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

4.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam analisis ini untuk mengetahui tingkat validitas dapat dilihat pada hasil olahan data. Pengujian instrument penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 30 responden. Untuk jumlah sampel = 30, nilai r_{tabel} dgn tingkat kepercayaan 0,05 adalah 0.361. Untuk uji validitas digunakan kriteria nilai

$r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan *valid* dan untuk uji reliabilitas adalah *reliabel* jika nilai *Alpha Crombach* > 0.60.

4.2.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintah (X)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel X pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7. Hasil Uji validitas dan Reliabilitas Variabel X

Variabel	Butir Soal	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
		r_{hitung}	r_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Standar Akuntansi Pemerintah (X)	X1	0,537	0.361	Valid	0,789	>0,60 : Reliabel
	X2	0,609	0.361	Valid		
	X3	0,465	0.361	Valid		
	X4	0,501	0.361	Valid		
	X5	0,554	0.361	Valid		
	X6	0,463	0.361	Valid		
	X7	0,462	0.361	Valid		
	X8	0,506	0.361	Valid		
	X9	0,724	0.361	Valid		
	X10	0,391	0.361	Valid		
	X11	0,438	0.361	Valid		
	X12	0,480	0.361	Valid		
	X13	0,583	0.361	Valid		
	X14	0,528	0.361	Valid		

Sumber : Data Olahan lampiran 3

Tabel di atas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel standar akuntansi pemerintah (X) menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. keputusan ini diambil karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,789. dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel standar akuntansi pemerintah adalah reliabel karena $\alpha_{cronbach} > 0,60$.

4.2.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel X pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8. Hasil Uji validitas dan Reliabilitas Variabel Y

Variabel	Butir Soal	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
		r_{hitung}	r_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	X1	0,540	0.361	Valid	0,802	>0,60 : Reliabel
	X2	0,662	0.361	Valid		
	X3	0,468	0.361	Valid		
	X4	0,522	0.361	Valid		
	X5	0,564	0.361	Valid		
	X6	0,735	0.361	Valid		
	X7	0,455	0.361	Valid		
	X8	0,671	0.361	Valid		
	X9	0,387	0.361	Valid		
	X10	0,597	0.361	Valid		
	X11	0,473	0.361	Valid		
	X12	0,724	0.361	Valid		

Sumber : Data Olahan lampiran 3

Tabel di atas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel kualitas laporan keuangan (Y) menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. keputusan ini diambil karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,802. dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel kualitas laporan keuangan adalah reliabel karena $alpha\ cronbach > 0,60$.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Normalitas data dalam penelitian ini di uji menggunakan Kolmogorov – smimov. Jika $p-value$ lebih besar dari α (0,05), maka data penelitian ini berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, (Sarjono dan Winda,2011). Berikut hasil pengujian normalitas data :

**Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.70904156
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.085
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		.574
Asymp. Sig. (2-tailed)		.897

a. Test distribution is Normal.

Sumber : hasil olahan data 2022

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Kolmogorov – Smirnov Z* sebesar 0,574 dengan nilai asymp Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0,897 yang berada diatas 0,05 seperti yang telah di isyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.5 Analisis Data Statistik

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 21, maka secara ringkas hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai B pada tabel Coefficients dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Model persamaan regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.401	4.621		4.631	.000
Standar akuntansi pemerintahan	.427	.107	.602	3.990	.000

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

$$\hat{Y} = 21.401 + 0.427X$$

Ket : Y = Kualitas Laporan Keuangan
X = Standar Akuntansi Pemerintah

Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah sebagai berikut:

a. $a = 21.401$

nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel ITO ($X=0$), maka konstanta pengendalian internal terbentuk adalah 21.401

b. $b = 0.427$

koefisien regresi b ini menunjukkan bahwa setiap variabel ITO meningkat sebesar satu satuan, maka pengendalian internal meningkat sebesar 42.7%.

Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 21.401%. Standar Akuntansi Pemerintah memberikan pengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Setiap kenaikan satu satuan skor variabel x (Standar Akuntansi Pemerintah) akan diikuti oleh kenaikan skor variabel (Kualitas Laporan Keuangan) sebesar rata-rata 42,7%.

Hasil analisis statistik yang menggunakan regresi tersebut akan diketahui apakah variabel-variabel bebas (Independen) memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap variabel terikat (dependen). Berdasarkan hasil pengolahan data atas 30 orang responden dengan menggunakan regresi sederhana, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis dan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y

Pengaruh variabel	Besarnya pengaruh	Nilai sig	Alpha (α)	Keputusan	kesimpulan
$Y \leftarrow X$	0,363	0.000	0.05	Signifikan	Diterima

Sumber : Hasil olahan Data 2022 (Lampiran 4)

Dari tabel diatas menunjukkan dapat dijelaskan oleh variasi variabel standar akuntansi pemerintah atau identik bahwa besarnya koefisien pengaruh standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,363 (36,3%). Dari analisis di atas terlihat nilai koefisien determinasi dari model regresi yang telah diperoleh sebelumnya didapatkan sebesar Nilai R = 0.602 dan R Square = 0,363.

Artinya bahwa variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh kontribusi sebesar 36,3% terhadap variabel kinerja pegawai, sedangkan 63,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Nilai R Square sebesar 0,363 atau 36,3% mengindikasikan bahwa nilai variabel kualitas laporan keuangan (Y) ditentukan oleh variabel standar akuntansi pemerintah (X). Terdapat variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model sebesar 63,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

4.2.6 Hipotesis Penelitian

Dari hasil estimasi nilai pengaruh yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, menandakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dengan nilai r square sebesar 3,63 (36,3%).

Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai t-hitung yang diperoleh dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H_0 ditolak,

dan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka H_0 diterima. Penentuan kriteria uji juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi untuk t-hitung yang diperoleh dengan nilai alpha yang digunakan. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha maka H_0 ditolak, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha maka H_0 diterima.

Secara eksplisit hasil pengujian signifikansi pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Keberartian Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t-hitung	Sig
Konstanta	21.401	4.621	4.631	.000
Standar akuntansi pemerintahan	.427	.107	3.990	.000

Sumber: Olah data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

Rumus yang digunakan adalah dengan hipotesis statistika sebagai berikut:

H_0 : : Koefisien regresi tidak signifikan

H_1 : : Koefisien regresi sangat signifikan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui nilai t-hitung 3.990 dibandingkan dengan nilai t-tabel 1.697. Maka nilai t-hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai t-tabel sehingga H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

4.2.7 Hubungan Korelasi Antar Variabel

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki hubungan korelasi terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil olahan data maka standar akuntansi pemerintah (X) menunjukkan hubungan korelasi positif dengan Variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,602 atau 60,2 %. Artinya hubungan tersebut berada pada kategori **Tinggi atau kuat**.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data spss variabel standar akuntansi pemerintah (X) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,363 (36,3%) dengan nilai sig lebih kecil dari nilai alpha yakni $0,000 \rightarrow 0,05$. Dengan demikian secara statistik variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara berpengaruh signifikan sehingga hipoteses yang diajukan di terima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Wayan Karsama (2017) juga menyimpulkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki regresi 0,175 dengan T hitung sebesar 2.991 dan nilai signifikan sebesar 0.005 lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05.

Dari hasil estimasi nilai pengaruh yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, menandakan bahwa standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil ini, menggambarkan

bahwa variabel ini merupakan hal yang penting bagi pemerintah Kabupaten untuk melihat kegiatan pegawai dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian regresi dan hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian yang baik mengenai indikator standar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pegawai akan mendorong pegawai bekerja dengan lebih baik.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang menggambarkan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang baik dengan adanya standar yang dijadikan patokan penyusunan laporan keuangan pemerintah dan memberikan kesimpulan apakah setiap pelaksanaan aktivitas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat dikatakan berkualitas dilihat dari hasil penelitian yang dijelaskan di atas bahwa adanya audit internal sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini dikarenakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah memenuhi beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut: 1. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat dipahami dengan jelas informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya. 2. Laporan keuangannya dapat di perbandingkan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang sajikan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang tiap tahun

mengalami peningkatan laba. 3. Penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan tepat pada waktunya yaitu pada tiap akhir bulan desember. Hal ini dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen dan menyajikan semua fakta keuangan sehingga tidak akan menyesatkan para pengguna laporan keuangannya. 4. Informasi keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ditunjukkan kepada pihak umum bukan hanya kepada pihak tertentu saja seperti para investor, auditor, dan lainnya. 5. Informasi keuangannya disajikan secara andal bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material.

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 Tahun 2010, menyatakan bahwa SAP dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah akan dilaporkan kepada DPR/DPRD dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan yang disampaikan sesuai PP 71 Tahun 2010 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Purba, 2017).

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan dari pemerintah pusat dan daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pemerintah akan lebih mudah dipahami serta dapat diukur tingkat kualitasnya berdasarkan SAP yang telah ditetapkan tersebut.

Variabel lain Dalam penelitian

Dari hasil olah data dengan menggunakan program SPSS, yang ada pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai r sebesar 0,427 atau 42,7 dalam membicarakan jenis variabel yang dilihat dari segi perannya telah di singgung hubungan atau pengaruh

dari suatu variabel yang di lihat dari segi perannya telah di singgung hubungan atau pengaruh dari suatu variabel dengan variabel lain yaitu variabel independent dengan dependen. Biasanya suatu penelitian ilmiah intinya mencari hubungan atau pengaruh suatu dengan variabel lain. Namum perlu di pertegas istilah pengaruh atau hubungan disini tidak selamanya harus mengandung makna hubungan kausal (sebab akibat) tetapi mungki berarti kecenderungan atau arah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh dalam menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai

tolak ukur penyusunan laporan keuangan dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu.

2. Besarnya pengaruh variabel standar akuntansi pemerintahan (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,363 (36,3%) hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
3. Untuk variabel lain atau nilai epsilon (ϵ) adalah sebesar 0,637 (63.7%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Keterbatasan penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat lebih di perhatikan bagi peneliti – peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus di perbaiki kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuisioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuisionernya.

2. Dalam pengisian kuisioner oleh responden masih terdapat beberapa item pernyataan yang kosong, yang oleh peneliti ini sendiri bisa menjadi kendala dalam mengelola data, sehingga di harapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih berhati – hati dalam melakukan pemilahan data..

5.3. Saran

Dari semua vaariabel yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan manajemen pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya sehingga pegawai dapat melaksanakan perannya sebagai penjamin mutu (*quality assurance*)
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang relevan terkait dengan penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan daerah seperti Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia..
3. Menyertakan pihak-pihak pengguna atau yang menilai laporan keuangan sebagai subjek penelitian, agar data yang diperoleh lebih relevan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul halim, 2002. Akuntansi sector public. Jakarta : salemba empat.

Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi KeuanganSKPD DiKota Banda Aceh. *Jurnal Akutansi ISSN*, 2302, 164.

Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi

- Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19-35.
- Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).
- Kisdarto Atmosoeparto, 2005. *Menuju SDM Berdaya – dengan kepemimpinan efektif dan manajemen efisien*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Kumorotomo, wahyudi. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Public, sketa pada masa Transisi*. jogjakarta : Pustaka pelajar
- Kustadi. Arinta. 1996. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung : citra Aditya Bakti.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah. *Cahaya Aktiva*, 2(02), 101-121.
- Mahmudi, (2013) Manajemen Kinerja Sektor Public. Sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Marlena, V. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan akuntansi Sektor
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Nopianti, Defi. 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah". Bandung Bussines School.

- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Ranggagading*, 12(1), 001-010.
- Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus: BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD di Provinsi Bengkulu). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(2), 39-49.
- Revrison baswir, 2000, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* Yogyakarta: BPFE
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Stephen P Robbins. Dan mary coulter, (2004) "*Manajemen*". Edisi ke tujuh, diterjemahkan oleh T. Hermaya dan Harry Slamet, Jakarta : indeks.
- Sugiyono, (2006). *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2014). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: Alfabeta.
- UNDP. 1997. *Governance for sustainable Human Depelopment: A UNDP Policy document*. Access on : 07 march 2010. Available.
- Zeyn, Elvira. Pengaruh *Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. Jurnal akuntansi. Universitas pasudan. Bandung, Jawa Barat.

No Responden :.....

KUISIONER
PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)

Kepada Yth,

Responden

Saya Wahyuni Samalam dari Mahasiswa tingkat akhir di Universitas Ichsan Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Saya sedang melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. saya mohon kesediaannya saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini dengan tepat dan benar. Atas kesediaan dan partisipasinya saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Wahyuni samalam

DATA RESPONDEN

Petunjuk

Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini dengan memberikan silang X

1. Jenis kelamin
 - a. Laki – laki
 - b. Perempuan

2. Usia

- a. 17 – 22 tahun
- b. 23 – 28 tahun
- c. 29 – 34 tahun
- d. > 35 tahun

I. Instansi :

II. Jabatan :

III. PETUNJUK

Isilah semua pernyataan dalam kuisioner sesuai dengan kenyataan, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sudah tersedia.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

No	PERNYATAAN	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
<i>Basis akuntansi</i>					

1.	Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendekatan telah terpenuhi walaupun kas belum di terima di rekening kas umum negara/daerah				
2.	Mengakui dan mencatat suatu transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan				
<i>Nilai historis</i>					
3.	Kewajiban di catat sebesar sejumlah kas dan setara kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan dtang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah				
4.	Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi				
<i>Realisasi</i>					
5.	Pendapatan berbasis kas yang tersedia melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja.				
6.	Instansi tempat saya bekerja selalu menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran				
<i>Subtansi mengguli bentuk formal</i>					
7.	Transaksi atau peristiwa dicatat dan di sajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi.				
<i>Periodiesitas</i>					
8.	Pelaporan perlu dibagi menjadi periode – periode pelaporan sehingga kinerja				

	instansi dapat diukur.				
9.	Periode utama yang digunakan adalah tahunan meskipun dikehendaki pula periode bulanan dan semester				
<i>Konsistensi</i>					
10.	Tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode lain				
11.	Pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar				
<i>Pengungkapan lengkap</i>					
12.	Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi				
13.	Pengungkapan informasi harus dapat di tempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan				
<i>Penyajian wajar</i>					
14.	Dalam penyajian wajar diperlukan bagi Menyusun laporan keuangan Ketika menghadapi ketidakpastian dalam peristiwa atau keadaan tertentu				

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

No	PERNYATAAN	STS	TS	S	SS
<i>Andal</i>					
1.	Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat				

	diandalkan maka informasi tersebut tidak andal				
--	--	--	--	--	--

2.	Informasi dalam laporan keuangan yan				
2	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan				
3.	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material				
<i>Relevan</i>					
4.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dapat membantu untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian dimasa kini				
5.	Informasi pada laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan				
6.	disusun oleh instansi saya bekerja telah sesuai dengan standar akuntansu pemerintah				
7.	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja lengkap dan mencakup semua informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan				
<i>Dapat di pahami</i>					
8.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi – informasi yang disajikan.				
9.	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja jelas				

	sehingga dapat dipahami oleh pengguna				
10.	Laporan keuangan yang dihasilkan dalam instansi saya disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti				
<i>Dapat dibandingkan</i>					
11	Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.				
12	Dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah				

Lampiran 1

DATA RESPONDEN

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Instansi
1	Risman	Laki-Laki	34	Badan kepegawaian Pendidikan dan pelatihan
2	Ester rusdin ahmad	Laki-Laki	29	Dinas koperasi ukm, perindustrian dan perdagangan kabupaten gorut
3	Rukia Tobuto	Perempuan	35	Dinas perumahan rakyat kabupaten Gorontalo utara
4	Rizna Djuka	Perempuan	30	Dinas kehutanan pertambangan dan energi kabupaten gorut
5	Badrun Lakoro	Laki-Laki	35	Dinas penanaman modal
6	Irfan Noho	Laki-Laki	35	Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gorut
7	Farida Tanaiyo	Perempuan	35	Dinas PMD kabupaten gorut
8	Feriyn desi warokka	Perempuan	28	Dinas satpol PP kabupaten gorut
9	Yulianti	Perempuan	34	Dinas Kesehatan
10	Djarua Usman	Perempuan	30	Badan keuangan kabupaten gorut
11	Sry wahyuni tolinggi	Perempuan	30	Kantor pertanahan kabupaten gorut
12	Mohammad ganahi T hasan	Laki-Laki	35	Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten gorut
13	Micaeli garungan	Laki-Laki	34	Dinas pariwisata kabupaten gorut
14	Hendra	Laki-Laki	30	Dinas PUPR kabupaten Gorut
15	Fery Djainudin	Laki-Laki	32	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorut
16	Dian M umar	Perempuan	31	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten gorut
17	Ririn	Perempuan	30	Dinas lingkungan hidup kabupaten gorut
18	Yuli bin santri	Perempuan	35	Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten gorut
19	F. Reymond jantu	Laki-Laki	35	Sekretariat DPRD
20	Rina Daud	Perempuan	33	Kantor Bupati kabupaten gorut
21	Rulin	Perempuan	32	Inspektorat
22	Wafir wahyu	Laki-Laki	25	Dinas pendapatan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten gorut
23	Meldi katingide	Laki-Laki	32	Dinas perhubungan kabupaten gorut
24	Dicky pomalingo	Laki-Laki	37	Dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan kabupaten gorut
25	Karsim hiola	Perempuan	36	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gorut
26	Delly hamzah	Perempuan	29	Kesbangol
27	Adelin	Perempuan	28	Dinas komunikasi dan informatika

				kabupaten gorut
28	Hartati didipu	Perempuan	37	Dinas perikanan
29	Nurmin abdurahman	Perempuan	39	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten gorut
30	Nova ismail	Perempuan	34	Dinas sosial

FREQUENCIES VARIABLES=JenisKelamin Umur
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet0]

Statistics

		JenisKelamin	Umur
N	Valid	30	30
	Missing	0	0

Frequency Table

JenisKelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	12	40.0	40.0	40.0
	Perempuan	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25	1	3.3	3.3	3.3
	28	2	6.7	6.7	10.0
	29	2	6.7	6.7	16.7
	30	5	16.7	16.7	33.3
	31	1	3.3	3.3	36.7
	32	3	10.0	10.0	46.7
	33	1	3.3	3.3	50.0
	34	4	13.3	13.3	63.3
	35	7	23.3	23.3	86.7

36	1	3.3	3.3	90.0
37	2	6.7	6.7	96.7
39	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 2 Data Frequency , Data Deskriptif

1. Data Frequency , Data Deskriptif Standar Akuntansi Pemerintah (X)

n	X														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	38
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
3	1	2	3	4	3	3	3	3	1	1	2	3	3	3	35
4	1	1	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	41
5	2	2	3	3	2	4	4	3	2	1	3	3	3	3	38
6	3	2	3	3	2	4	3	4	3	2	3	4	4	3	43
7	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	40
8	2	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4	3	43
9	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	4	4	3	41
10	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	39
11	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	39
12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	46
13	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	47
14	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	41
15	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	49
16	2	3	3	3	2	3	3	3	2	4	4	3	2	2	39
17	2	2	3	4	4	4	3	3	1	2	3	4	3	3	41
18	2	3	2	2	3	3	3	4	2	3	3	4	4	2	40
19	2	2	3	4	3	4	2	3	2	2	3	3	3	3	39
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42

21	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	2	4	4	3	46
22	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	2	45
23	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	36
24	1	1	2	2	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	40
25	3	4	4	4	4	3	2	3	2	3	3	4	4	3	46
26	4	3	2	4	3	3	4	3	4	4	2	3	3	4	46
27	2	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	51
28	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	49
29	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	53
30	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	53

FREQUENCIES VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1]

Statistics

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14
N Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Mis- sing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

x1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	10.0	10.0	10.0
2	11	36.7	36.7	46.7
3	13	43.3	43.3	90.0
4	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	6.7	6.7	6.7
2	9	30.0	30.0	36.7
3	13	43.3	43.3	80.0
4	6	20.0	20.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	4	13.3	13.3	13.3
3	19	63.3	63.3	76.7
4	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	6.7	6.7	6.7
3	15	50.0	50.0	56.7
4	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	5	16.7	16.7	16.7
3	18	60.0	60.0	76.7
4	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	3.3	3.3	3.3
3	17	56.7	56.7	60.0
4	12	40.0	40.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	6.7	6.7	6.7
3	19	63.3	63.3	70.0
4	9	30.0	30.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	3.3	3.3	3.3
3	20	66.7	66.7	70.0
4	9	30.0	30.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	6.7	6.7	6.7
2	11	36.7	36.7	43.3
3	13	43.3	43.3	86.7
4	4	13.3	13.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	6.7	6.7	6.7

2	6	20.0	20.0	26.7
3	19	63.3	63.3	90.0
4	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	7	23.3	23.3	23.3
3	18	60.0	60.0	83.3
4	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	3.3	3.3	3.3
3	12	40.0	40.0	43.3
4	17	56.7	56.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	6.7	6.7	6.7
3	15	50.0	50.0	56.7
4	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

x14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	5	16.7	16.7	16.7
3	20	66.7	66.7	83.3
4	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

DESCRIPTIVES VARIABLES=X
/STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX.

Descriptives

[DataSet1]

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Standar akuntansi pemerintahan	30	18	35	53	42.93	4.785	22.892
Valid N (listwise)	30						

2. Data Frequency , Data Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan (Y)

n	Y												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	41
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	40
6	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	39
9	4	4	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	40
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
12	3	3	1	3	3	3	4	3	4	4	4	4	39
13	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	44
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
16	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	41
17	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	40
18	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	37
19	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	42
22	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	45
23	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	41
24	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	39
25	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	41
26	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	43
27	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	46
28	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	45
29	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	45
30	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	45

FREQUENCIES VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1]

Statistics

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12
N	Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	19	63.3	63.3	66.7
	4	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	63.3	63.3	63.3
	4	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	2	1	3.3	3.3	6.7
	3	19	63.3	63.3	70.0
	4	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	22	73.3	73.3	80.0
	4	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23	76.7	76.7	76.7
	4	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	17	56.7	56.7	56.7
	4	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	63.3	63.3	63.3
	4	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	20	66.7	66.7	66.7
	4	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	22	73.3	73.3	73.3
	4	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	21	70.0	70.0	70.0
	4	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	17	56.7	56.7	56.7
	4	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

y12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	63.3	63.3	63.3
	4	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=Y
/STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX.
```

Descriptives

[DataSet1]

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kualitas laporan keuangan	30	10	36	46	39.73	3.393	11.513
Valid N (listwise)	30						

LAMPIRAN 3. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintah (X)

```
CORRELATIONS
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 X
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlations

Correlations

		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	Variabel X
x1	Pearson Correlation	1	.624**	.097	.214	.127	.161	.094	.059	.461*	.216	-.061	.034	.146	.287	.537**
	Sig. (2-tailed)		.000	.610	.255	.503	.394	.622	.756	.010	.252	.747	.857	.441	.125	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x2	Pearson Correlation	.624**	1	.377*	.233	.155	.113	.045	.144	.270	.131	.222	.263	.298	.205	.609**
	Sig. (2-tailed)	.000		.040	.215	.414	.551	.814	.448	.149	.491	.239	.161	.109	.277	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x3	Pearson Correlation	.097	.377*	1	.452*	.337	.194	.030	.022	.077	-.101	.018	.437*	.452*	.097	.465**
	Sig. (2-tailed)	.610	.040		.012	.068	.304	.875	.909	.685	.594	.926	.016	.012	.611	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x4	Pearson Correlation	.214	.233	.452*	1	.549**	.400*	.141	-.100	.210	-.110	-.023	.111	.179	.477**	.501**
	Sig. (2-tailed)	.255	.215	.012		.002	.029	.456	.597	.265	.561	.902	.558	.343	.008	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x5	Pearson Correlation	.127	.155	.337	.549**	1	.317	.051	.255	.249	.183	.096	.182	.286	.367*	.554**
	Sig. (2-tailed)	.503	.414	.068	.002		.088	.791	.173	.185	.334	.616	.335	.125	.046	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

x6	Pearson Correlation	.161	.113	.194	.400*	.317	1	.156	.484**	.233	-.207	.362*	.123	.097	.211	.463**
	Sig. (2-tailed)	.394	.551	.304	.029	.088		.409	.007	.216	.272	.049	.517	.608	.263	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x7	Pearson Correlation	.094	.045	.030	.141	.051	.156	1	.365*	.493**	.219	.234	.135	.240	.310	.462*
	Sig. (2-tailed)	.622	.814	.875	.456	.791	.409		.047	.006	.244	.213	.479	.201	.096	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x8	Pearson Correlation	.059	.144	.022	-.100	.255	.484**	.365*	1	.404*	.170	.469**	.317	.330	.000	.506**
	Sig. (2-tailed)	.756	.448	.909	.597	.173	.007	.047		.027	.370	.009	.088	.075	1.000	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x9	Pearson Correlation	.461*	.270	.077	.210	.249	.233	.493**	.404*	1	.553**	.284	.065	.280	.508**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.010	.149	.685	.265	.185	.216	.006	.027		.002	.128	.734	.134	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x10	Pearson Correlation	.216	.131	-.101	-.110	.183	-.207	.219	.170	.553**	1	.262	.144	.044	.081	.391*
	Sig. (2-tailed)	.252	.491	.594	.561	.334	.272	.244	.370	.002		.162	.449	.819	.672	.032
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x11	Pearson Correlation	-.061	.222	.018	-.023	.096	.362*	.234	.469**	.284	.262	1	.195	.152	.092	.438*
	Sig. (2-tailed)	.747	.239	.926	.902	.616	.049	.213	.009	.128	.162		.302	.423	.629	.016
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x12	Pearson Correlation	.034	.263	.437*	.111	.182	.123	.135	.317	.065	.144	.195	1	.700**	.000	.480**
	Sig. (2-tailed)	.857	.161	.016	.558	.335	.517	.479	.088	.734	.449	.302		.000	1.000	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x13	Pearson Correlation	.146	.298	.452*	.179	.286	.097	.240	.330	.280	.044	.152	.700**	1	.191	.583**
	Sig. (2-tailed)	.441	.109	.012	.343	.125	.608	.201	.075	.134	.819	.423	.000		.312	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x14	Pearson Correlation	.287	.205	.097	.477**	.367*	.211	.310	.000	.508**	.081	.092	.000	.191	1	.528**
	Sig. (2-tailed)	.125	.277	.611	.008	.046	.263	.096	1.000	.004	.672	.629	1.000	.312		.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Variable X	Pearson Correlation	.537**	.609**	.465**	.501**	.554**	.463**	.462*	.506**	.724**	.391*	.438*	.480**	.583**	.528**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.010	.005	.002	.010	.010	.004	.000	.032	.016	.007	.001	.003	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```


Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.789	14

2. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

```

CORRELATIONS
/VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 Y
/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.
  
```

Correlations

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	Variabel Y
y1	Pearson Correlation	1	.487**	.116	.102	.285	.524**	.355	.269	-.201	.180	.141	.355	.540**
	Sig. (2-tailed)		.006	.540	.593	.127	.003	.054	.151	.288	.342	.458	.054	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y2	Pearson Correlation	.487**	1	.297	.213	.398*	.591**	.282	.489**	.010	.106	.172	.426*	.662**
	Sig. (2-tailed)	.006		.112	.259	.029	.001	.131	.006	.956	.578	.363	.019	.000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y3	Pearson Correlation	.116	.297	1	.225	.193	.350	.085	.433*	-.069	.134	.041	.085	.468**
	Sig. (2-tailed)	.540	.112		.232	.307	.058	.656	.017	.716	.481	.829	.656	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y4	Pearson Correlation	.102	.213	.225	1	.484**	.306	.074	.236	.141	.262	.171	.351	.522**
	Sig. (2-tailed)	.593	.259	.232		.007	.101	.698	.209	.457	.161	.367	.057	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y5	Pearson Correlation	.285	.398*	.193	.484**	1	.631**	.398*	.111	.024	.155	-.005	.234	.564**
	Sig. (2-tailed)	.127	.029	.307	.007		.000	.029	.558	.901	.414	.978	.212	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y6	Pearson Correlation	.524**	.591**	.350	.306	.631**	1	.591**	.381*	-.071	.161	.186	.312	.735**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.058	.101	.000		.001	.038	.709	.394	.326	.094	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y7	Pearson Correlation	.355	.282	.085	.074	.398*	.591**	1	.049	.010	.408*	-.107	-.005	.455*
	Sig. (2-tailed)	.054	.131	.656	.698	.029	.001		.797	.956	.025	.574	.980	.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y8	Pearson Correlation	.269	.489**	.433*	.236	.111	.381*	.049	1	.533**	.309	.238	.489**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.151	.006	.017	.209	.558	.038	.797		.002	.097	.206	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y9	Pearson Correlation	-.201	.010	-.069	.141	.024	-.071	.010	.533**	1	.592**	.385*	.480**	.387*
	Sig. (2-tailed)	.288	.956	.716	.457	.901	.709	.956	.002		.001	.035	.007	.035
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y10	Pearson Correlation	.180	.106	.134	.262	.155	.161	.408*	.309	.592**	1	.308	.558**	.597**
	Sig. (2-tailed)	.342	.578	.481	.161	.414	.394	.025	.097	.001		.097	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y11	Pearson Correlation	.141	.172	.041	.171	-.005	.186	-.107	.238	.385*	.308	1	.731**	.473**
	Sig. (2-tailed)	.458	.363	.829	.367	.978	.326	.574	.206	.035	.097		.000	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y12	Pearson Correlation	.355	.426*	.085	.351	.234	.312	-.005	.489**	.480**	.558**	.731**	1	.724**
	Sig. (2-tailed)	.054	.019	.656	.057	.212	.094	.980	.006	.007	.001	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Variable Y	Pearson Correlation	.540**	.662**	.468**	.522**	.564**	.735**	.455*	.671**	.387*	.597**	.473**	.724**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.009	.003	.001	.000	.012	.000	.035	.000	.008	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

```

RELIABILITY
/VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.802	12

LAMPIRAN 4. UJI HIPOTESIS

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X
/RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID)

```

/SAVE RESID.

Regression

[DataSet1]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas laporan keuangan	39.73	3.393	30
Standar akuntansi pemerintahan	42.93	4.785	30

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Standar akuntansi pemerintahan ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.602 ^a	.363	.340	2.757	.363	15.924	1	28	.000

a. Predictors: (Constant), Standar akuntansi pemerintahan

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.038	1	121.038	15.924	.000 ^a
	Residual	212.828	28	7.601		
	Total	333.867	29			

a. Predictors: (Constant), Standar akuntansi pemerintahan

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.401	4.621		4.631	.000
Standar akuntansi pemerintahan	.427	.107	.602	3.990	.000

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	36.35	44.03	39.73	2.043	30
Residual	-6.324	4.654	.000	2.709	30
Std. Predicted Value	-1.658	2.104	.000	1.000	30
Std. Residual	-2.294	1.688	.000	.983	30

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

```

NPAR TESTS
  /K-S (NORMAL) =RES_1

  /MISSING ANALYSIS.

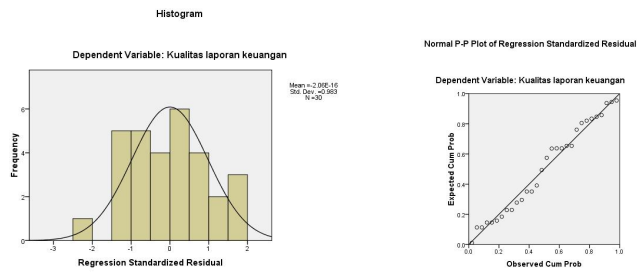
```

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.70904156
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.085
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		.574
Asymp. Sig. (2-tailed)		.897
a. Test distribution is Normal.		

Charts



LAMPIRAN 5. UJI KORELASI

CORRELATIONS /VARIABLES=X Y /PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations

		Kualitas laporan keuangan	Standar akuntansi pemerintahan
Pearson Correlation	Kualitas laporan keuangan	1.000	.602
	Standar akuntansi pemerintahan	.602	1.000
Sig. (1-tailed)	Kualitas laporan keuangan	.	.000
	Standar akuntansi pemerintahan	.000	.
N	Kualitas laporan keuangan	30	30
	Standar akuntansi pemerintahan	30	30



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3671/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
UTARA

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wahyuni Samalam
NIM : E1118112
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO
UTARA
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusno Danupajo Kompleks Blok Plan Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 90 / V / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SYAFRUDIN J. BORONG, SH, M.AP**
Nip : 19680224 200212 1 005
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ IV a
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gorontalo Utara.

Memberikan Keterangan Kepada:

N a m a : **WAHYUNI SAMALAM**
NIM : E1118112
Program Studi : Akuntansi
Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan Penelitian di 30 (Tiga Puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Judul Penelitian: "***Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)***". Penelitian dilakukan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 17 Mei 2022

**A. H. KEPALA BADAN
SEKRETARIS**

SYAFRUDIN J. BORONG, SH, M.AP
NIP. 19680224 200212 1 005

Tembusan:

1. Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan)
2. Pimpinan OPD Se-Kabupaten Gorontalo Utara
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 047/SRP/FE-UNISAN/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Wahyuni Samalam
NIM : E1118112
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Dekan,

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 27 Mei 2022
Firm Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com Internet	4%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	4%
3	core.ac.uk Internet	3%
4	portal.gorutkab.go.id Internet	3%
5	repository.usd.ac.id Internet	2%
6	scribd.com Internet	1%
7	jurnalwahana.aaykpn.ac.id Internet	1%
8	text-id.123dok.com Internet	<1%

9	adoc.pub Internet	<1%
10	id.123dok.com Internet	<1%
11	ejurnal.pps.ung.ac.id Internet	<1%
12	coursehero.com Internet	<1%
13	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
14	digilib.iain-jember.ac.id Internet	<1%
15	id.scribd.com Internet	<1%
16	jptam.org Internet	<1%
17	e-journal.iaingorontalo.ac.id Internet	<1%
18	betaraubd.wordpress.com Internet	<1%
19	http://com%2F2013%2F02%2F04%2Ffive-questions-for-author-%3F_r%... Internet	<1%
20	repository.unpas.ac.id Internet	<1%

21	sorev.unisan.ac.id	<1%
	Internet	
22	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id	<1%
	Internet	
23	journals.unihaz.ac.id	<1%
	Internet	
24	journal.feb.unmul.ac.id	<1%
	Internet	
25	jurnal.stiekesatuan.ac.id	<1%
	Internet	
26	repository.pelitabangsa.ac.id:8080	<1%
	Internet	
27	repository.unib.ac.id	<1%
	Internet	
28	samryaazza.blogspot.com	<1%
	Internet	
29	eprints.mercubuana-yogya.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis Wahyuni Samalam, dilahirkan di Kwandang 09 juni 1999, merupakan anak kedua dari Bapak Tarif Samalam dan Ibu Selvi Kuengo Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Moluo pada tahun 2010, dan melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kwandang pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara pada tahun 2016 dengan jurusan IPA. Penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo, penulis telah banyak mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan formal maupun non formal dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi diantaranya :

1. Mengikuti Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2018
2. Mengikuti Bakti Sosial (Baksos) di Desa Mutiara Laut tahun 2018
3. Mengikuti pengkaderan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Desa Mutiara Laut tahun 2018
4. Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian (KKLP) di PT. BANK BRI KC Limboto Kota Gorontalo pada Tahun 2021